

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang mengenai gugatan hak asuh anak yang masih di bawah umur yang terjadi karena pihak Tergugat (saudara perempuan kandung istri) mengajukan permohonan perwalian anak tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat (sebagai ayah kandung). Permasalahannya adalah gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sampang sementara para pihak beragama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai kompetensi absolut Pengadilan dalam menangani perkara ini dan hak ayah kandung yang memperoleh hak asuh anak menurut konsep *hadhanah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk memeriksa perkara hak asuh anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Pengadilan Agama mengatur kewenangan memeriksa hak asuh anak para pihak yang beragama Islam ada di Pengadilan Agama. Putusan ini menjatuhkan hak asuh anak pada ayah kandung padahal menurut konsep *hadlanah* dalam Hukum Islam, hak asuh anak seharusnya jatuh pada ibu dan/atau garis keturunan dari ibu. Oleh karena itu, hak asuh anak seharusnya beralih kepada Tergugat yang merupakan saudara kandung isteri bukan diberikan kepada Penggugat.

Kata Kunci: Kompetensi, Hak perwalian anak, penafkahan, *hadlanah*

ABSTRACT

This was a study on the Court Decision Number. 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang on child custody. This case occurred as the plaintiff (the child's father) rejected the defendant's request of child's custody. The defendant (the child's aunt) applied for guardianship of children without the permission of the plaintiff. This case appeared the problem on the competence of the court because the parties are Muslims. Therefore, this study aimed to clarify the absolute competence of the Court and the rights of the father gained the child's custody according to the Islamic concept of *hadlanah*. The was a legal research by using case approach. The results of this study showed that The Court of Sampang did not have competence to examine and decide the child's custody case whose parties according to the Law of *Shari'ah* Court Procedure. It belongs to the *Shari'ah* Court's competence. Besides, the child's father had no right to get the child's guardianship according to the concept of *hadlanah* in Islamic law. The one who has a right of the child's custody is on the mother and/or the lineage of the mother. Therefore, custody of children should be given to the Defendant not the Plaintiff. The judge should also consider the witnesses' testimony about the ability of the plaintiff to expense the child's need. In fact, the plaintiff had no permanent job and salary to conduct the child's guardianship.

Keywords: Competence, child's custody, guardianship, *hadlanah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
A. Kegunaan Teoritis	6
B. Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	11

BAB II DASAR HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BERAGAMA ISLAM 12

2.1 Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Hak Asuh Anak	12
2.1.1 Kewenangan Pengadilan Negeri	12

2.1.2 Kewenangan Pengadilan Agama	13
2.2 Putusnya Perkawinan	15
2.3 Hak Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	17
2.4 <i>Hadhanah</i> (Hak Perwalian Anak).....	19
2.4.1 Pemegang <i>Hadhanah</i>	22
2.4.2 Dasar Hukumnya <i>Hadhanah</i>	24
2.4.3 Syarat-Syarat Perwalian Anak	25
2.4.4 Biaya Untuk Mengasuh Anak	27
2.4.5 Berakhirnya Masa Asuhan Terhadap Anak	29
2.4.6 Perebutan Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	31

BAB III ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 15/ PDT.G/ 2012/ PN. SAMPANG MENGENAI SENGKETA HAK PERWALIAN ANAK

33

3.1 Posisi Kasus Putusan	33
3.2 Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa, Memutus Gugatan Perwalian Anak di antara Para Pihak Yang Beragama Islam Dalam Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Spg	41
3.3 Analisis Hak Perwalian Anak Dalam Putusan No 15/Pdt.G/2012/PN. Sampang Menurut Konsep <i>Hadhanah</i>	47

BAB IV PENUTUP

67

4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

69

LAMPIRAN

72